



Membangun Co-Management pengelolaan Kawasan DAS Meko
Dan Salukaia di DTA Danau Poso
Lembaga Perkumpulan Inovasi Komunitas (IMUNITAS) Palu



LAPORAN AKHIR PROGRAM

2016-2017

I. INFORMASI PROGRAM

- Wilayah Pendanaan : Danau Poso Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah
- KBA : Danau Poso (IDN 073)
- Strategic Direction(s) :
1. Tindakan untuk mengatasi ancaman yang spesifik bagi spesies prioritas (SD 1)
 2. Meningkatkan pengelolaan kawasan (KBA) yang dilindungi maupun yang tidak Dilindungi (SD 2)
 3. Meningkatkan kapasitas masyarakat sipil untuk aksi konservasi yang efektif di Wallacea (SD 6)
- Nama Proyek : Membangun Co Management sebagai model pengelolaan kawasan DAS Meko dan Salukai di DTA di Danau poso
- Nomor Laporan : 03
- Periode waktu : Februari ari 2016 – Februari 2017 (12 bulan)
- Disampaikan oleh : Theophilus Samba`a (Koordinator program)
- Tanggal : 15, Februari, 2017

Hibah CEPF:

(a) dalam USD: **19,520,77**

(b) dalam mata uang lokal (Rp) : **253,770,000**

Kontribusi Mitra: berupa *In kind* meliputi alokasi staff, kantor dan perlengkapan pendukung kerja berupa kendaraan, naote book dan desktop

Kontribusi donor (program) lain (jika ada): -

Periode program: Februari 2016 – Februari 2017

Lembaga pelaksana (mitra): Perkumpulan Inovasi Komunitas (IMUNITAS) Palu Sulawesi Tengah-Indonesia

II. RINGKASAN

Kondisi & Perkembangan Program Secara Umum.

Danau Poso merupakan sebuah ekosistem unik dan kebanggaan bukan hanya bagi Kabupaten Poso tetapi juga bagi Provinsi Sulawesi Tengah, serta menjadi sumber kehidupan masyarakat terutama di sekitar danau. Saat ini, setelah beroperasinya pembangkit listrik Sulewana yang dikelola oleh PT. Poso Energy yang sumber energinya mendapat pasokan air dari Danau Poso, penerima manfaat dari sumber energy ini telah menembus batas provinsi. Di sisi lain, danau Poso juga menyimpan berbagai masalah mulai dari tingginya tingkat sedimentasi, pencemaran, sampai potensi punahnya sumberdaya hayati endemik. Faktor penyebab permasalahan tersebut diduga berasal dari alih fungsi lahan di kawasan hulu, limbah pertanian, peternakan maupun domestic serta pemanfaatan air danau untuk pembangkit listrik yang dikhawatirkan dapat menghambat siklus hidup biota endemik Danau Poso menuju kepunahan. Dengan demikian urgensi penyelamatan Danau Poso semakin besar dan mendesak.

Salah satu masalah pengelolaan danau adalah benturan kewenangan baik secara sektoral maupun antar batas administrasi. Fakta di Indonesia menunjukkan bahwa pengelolaan ekosistem yang secara geografis meliputi kewenangan berbagai kabupaten/kota dan *stakeholders* tidaklah mudah. Menumbuhkan dan menyatukan berbagai kepentingan dalam semangat bersama (*commonvision*), kebersamaan dan keswadayaan juga tidak sederhana, namun tidak berarti tidak mungkin. Beberapa contoh pengelolaan lingkungan hidup dari Negara maju seperti Jepang, Amerika Serikat, Kanada, Australia dan negara-negara di Eropa, menunjukkan bahwa negara-negara tersebut mampu mengelola dengan baik ekosistem danau, pegunungan maupun sungai yang bahkan melewati batas negara. Kalau antar negara saja bisa, maka antar provinsi, kabupaten, kecamatan apalagi desa, mestinya lebih mudah.

Danau Poso memiliki luas kurang lebih 32.000 hektar, dikelilingi hutan dan pegunungan. Danau ini berada pada ketinggian 657 meter di atas permukaan laut, Saat ini keberadaan kawasan Danau Poso sudah sangat mengkhawatirkan, ditandai dengan kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) yang mengalami degradasi. Indikatornya berupa semakin meluasnya lahan kritis, erosi pada lereng-lereng curam baik yang digunakan untuk pertanian maupun peruntukan lain seperti pemukiman, pertambangan dan sebagainya. Dampak yang ditimbulkan antara lain banjir yang semakin besar dan frekuensinya meningkat, debit air sungai di musim kemarau yang sangat rendah, percepatan sedimentasi pada danau dan jaringan irigasi, serta penurunan kualitas air. Keseluruhan dampak ini mengancam keberlanjutan ekosistem kawasan danau dan pembangunan khususnya pembangunan pertanian, pariwisata dan energi. Oleh karena itu, Danau Poso masuk dalam kategori danau Prioritas yang merupakan salah satu dari 15 (lima belas) danau prioritas yang disepakati pada Kesepakatan Bali tentang Pengelolaan Danau Berkelanjutan saat penyelenggaraan Konferensi Nasional Danau Indonesia I tahun 2009 di Denpasar Bali, yang perlu

mendapat perhatian serius dari semua *stakeholders*. Dalam pengembangan, pemanfaatan dan pelestarian fungsi danau sangat diperlukan upaya untuk mempertahankan, melestarikan dan memulihkan fungsi danau, DAS dan DTA berdasarkan keseimbangan ekosistem. Dengan cara pengelolaan pengelolaan terpadu dengan pelibatan para pihak. Kondisi ini, memerlukan kebijakan dalam pengelolaan pada wilayah terrestrial khususnya pada DAS dan DTA Danau Poso yang masuk pada wilayah kecamatan Pamona Barat. Penyiapan masyarakat Desa Meko, dan Salukaia Kecamatan Pamona Barat, Pemda Poso, serta keterlibatan pihak swasta sangatlah penting.

Pendekatan dengan model pengelolaan terpadu sangat diperlukan yaitu pendekatan yang menuntut suatu manajemen terbuka yang menjamin berlangsungnya proses koordinasi antara lembaga atau instansi terkait, dan memandang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan danau Poso dan DAS di sekitarnya. Saat ini terlihat ekosistem danau dan DAS di Kawasan Danau Poso tidak dikelola sebagaimana mestinya. Sehingga terjadi pemanfaatan kawasan lebih mendominasi sumberdaya alam danau dan kawasan daerah aliran sungai (*watershed*) dan hal ini dapat mengakibatkan danau berada pada kondisi suksesi, yaitu berubah dari ekosistem perairan ke bentuk ekosistem daratan. Pendangkalan akibat erosi, eutrofikasi merupakan penyebab suksesi suatu perairan danau yang akan mengancam hilangnya spesies spesifik seperti ikan Buntingi paruh-bebek, Bungu Poso, Kura-kura Hutan Sulawesi dan spesies endemik lainnya. Kondisi ini, memerlukan kebijakan dalam pengelolaan ekosistem terrestrial pada DAS dan DTA. Penyiapan masyarakat, pemerintah daerah, serta keterlibatan pihak swasta. Penetapan model pengelolaan danau, DAS dan DTA diperlukan untuk menekan laju kerusakan ekosistem danau Poso. Kondisi ini, memerlukan kebijakan dalam pengelolaan ekosistem terrestrial pada DAS Meko dan Salukaia di DTA Danau Poso. Penyiapan masyarakat Desa Meko dan Salukaia, pemda Poso, serta keterlibatan pihak swasta. Penetapan model pengelolaan danau, DAS dan DTA diperlukan untuk menekan laju kerusakan ekosistem di danau Poso.

Dalam kurun satu tahun program berjalan aktivitas –aktivitas yang telah dilakukan adalah sosialisasi dan desiminasi kepada Pemerintah dan masyarakat baik secara formal maupun non formal pada setiap kesempatan, telah dilaksanakan pula kegiatan Pelatihan dan Pengumpulan Data dan Informasi Sumber Daya Alam dan Pemanfaatannya dengan metode Perencanaan Konservasi Partisipatif (PKP), membentuk kelompok pemerhati dan pelestari DAS dan DTA danau Poso di desa Meko dan Salukaia (*Desa Meko Kelompok Bungu Lestari dan Desa Salukaia Kelompok Mahapi*) sebagai lokasi sasaran proyek kelompok yang di bentuk ini dilengkapi dengan AD-ART dan program kerja tahunan, yang paling penting adalah desa Meko dan Salukai telah memiliki Dokumen Rencana Partisipatif Pengelolaan Kawasan DAS dan DTA danau Poso yang di tandatangi oleh lembaga desa dan pemerintah desa maupun Kecamatan Pamona Barat, untuk penguatan kapasitas, anggota yang tergabung dalam kelompok pemerhati dan pelestari DAS dan DTA danau Poso di beri Pelatihan dan Monitoring Kesehatan hutan

yang bertujuan agar kelompok mampu melakukan pemantauan terhadap kondisi hutan yang ada di wilayah desa mereka , sebagai wujud membangun co management pada tataran masyarakat dan pihak yang berkepentingan dalam bentuk kegiatan konsultasi publik dan pertemuan berkala multistakeholder dengan menghadirkan SKPD dan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kecamatan maupun pada tingkat kabupaten, mendekati akhir implementasi proyek dilakukan rehabilitasi lahan kritis dengan menanam pohon sebanyak 4000 pohon pada lokasi –lokasi yang di anggap kritis pada wilayah sepadan sungai Meko dan Salukia juga pada wilayah pesisir danau Poso kegiatan penanaman ini melibatkan anggota kelompok pemerhati dan pelestari DAS dan DTA danau Poso dari desa Meko dan desa Salukai serta masyarakat.

III. CAPAIAN

A. Objective :

Terbangunya secara partisipatif model perlindungan DTA dan DAS Danau Poso sebagai upaya konservasi jenis penting dan ekosistemnya dan mendapatkan dukungan dari pemerintah

Objective telah dicapai oleh program dengan terpenuhinya indikator sebagai berikut :

1. Membangun tata kelola untuk sepadan DAS Meko dan Saluakia di DTA Danau Poso pada level desa yang diintegrsikan dalam RPJMDes di desa Meko dan Salukaia serta renstra danau Poso,Rencana Kerja atau BP-DAS,KPH dan SKPD terkait
2. Terbangunnya kapasitas Lokal untuk pelestarian danau poso di desa Meko dan Salukai agar dapat membangun sinergi dengan Pemda Poso,UPT terkait dan pihak lain

Indikator 1 dipenuhi melalui capaian dihasilkannya Dokumen Rencana Pengelolaan Sepadan DAS Meko dan Salukaia di DTA Danau Poso di level desa yang diintegrsikan dalam RPJMDes serta renstra danau Poso, Rencana Kerja atau BP-DAS, KPH dan SKPD terkait pencapaian ini dilakukan secara partisipatif dengan tahapan kegiatan (sd 3 ind 3)meliputi :

1. Menyusun draft dokumen pada dua desa dilaksanakan tanggal 27-28 Juli 2016 secara bersamaan di desa Meko dan desa Salukaia dengan peserta sejumlah 50 orang dengan komposisi perempuan 17 orang dan laki-laki 33 orang. Pertemuan ini dihadiri oleh pemerintah desa, Perwakilan BPD dan tokoh masyarakat dan tokoh perempuan serta tokoh Agama dan dibuktikan oleh alat verifikasi Draft dokumen, Daftar hadir, Notulensi dan Dokumentasi kegiatan
2. Konsultasi Publik draft dokumen tanggal 21 November 2016 bertempat di kantor desa Meko yang dihadiri oleh 30 orang dengan komposisi Laki-laki= 19 dan perempuan=11 orang, desa Salukai dilaksanakan selasa tanggal 22 November 2016 bertempat di kantor desa Salukai dihadiri oleh 30 orang dengan komposisi laki-laki 22 orang dan perempuan 8 orang terdiri dari perwakilan SKPD terkait dan perwakilan Kecamatan, Babinkamtibmas Pamona Barat, Kepala desa Salukaia, perwakilan pemerintah desa Toinasa dan desa Uranosari, Staff Bappeda dan Dinas Kehutanan, Perkumpulan Inovasi Komunitas serta kelompok Bungu Lestari dan anggota kelompok Mahapi selanjutnya Finalisasi dan legalisasi dokumen kesepakatan partisipatif

pengelolaan kawasan DAS Meko dan Salukai di DTA danau Poso dan dibuktikan oleh alat verifikasi Draft dokumen, Daftar hadir, Notulensi dan Dokumentasi kegiatan

3. Pertemuan berkala multi Stakeholder dilaksanakan dalam rangka sosialisasi kesepakatan Partisipatif pengelolaan DAS Meko dan Salukai di DTA danau Poso dan di rangkaiakan konsultasi publik tingkat kecamatan, kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Camat Pamona Barat pada hari Kamis 24 November 2016 dihadiri oleh 47 orang dengan komposisi perempuan 11 orang dan laki-laki 36 orang. Peserta berasal dari SKPD terkait, pemerintah kecamatan Pamona Barat, TNI, Polri, Tokoh masyarakat, Perwakilan Perempuan, Pemerintah Desa se- kecamatan Pamona Barat dan masyarakat desa Meko dan Desa Salukaia.
4. Pertemuan berkala multi stake holder yang kedua di laksanakan pada tanggal 29 November 2016 di Kantor Bappeda Poso dihadiri oleh 30 orang peserta dengan komposisi orang laki-laki 22 orang dan perempuan 8 orang. Peserta berasal dari SKPD terkait, pemerintah kecamatan Pamona Barat, Akademisi, NGO, Swasta, pemerintah desa Meko, pemerintah desa Salukai dan perwakilan kelompok Mahapi desa Salukai dan perwakilan Kelompok Bungu Lestari desa Meko. Pertemuan multi stake holder yang dikemas dalam bentuk konsultasi publik sekaligus sosialisasi lembaga Funding dan implementator, output program, kelompok pengelola DAS desa Meko (Bungu Lestari) dan Salukai (MAHAPI), dukungan dan komitmen dari SKPD terkait, Akademisi, dan pihak swasta merupakan capaian sekaligus indikator dari model kolaborasi multi pihak dalam pengelolaan kawasan DAS Meko dan Salukai di DTA danau Poso kearah yang lebih baik, sinergis dan berkelanjutan. Pencapaian indikator ini khususnya pada tingkat desa menjadisebuah hal yang strategis untuk di jadikan instrumen kebijakan desa yang di masukan atau di integrasikan dalam RPJMDesa, Rencana Kerja Tahunan Desa (RKPDdes), dan pada saat Musrembangdesa serta di lingkaran dengan SKPD terkait serta pihak Swasta agar kesepakatan pengelolaan DAS Meko dan Salukaia di DTA danau Poso ditingkat Desa bisa terintegrasi dan terealisasi dan dibuktikan oleh alat verifikasi Daftar hadir, Notulensi dan Dokumentasi kegiatan.

Indikator 2 dipenuhi melalui capaian :

Ada 1 kelompok masyarakat pelestari kawasan DAS Meko dan Salukaia di DTA danau poso yaitu Kelompok Bungu Lestari desa meko dan kelompok Mahapi desa Salukai yang beranggoatkan masing-masing 15 orang yang telah dilegalisasi di desa melalui SK kepala desa dibuktikan oleh alat verifikasi : alat verifikasi template kegiatan, SK kelompok Bungu Lestari desa Meko nomor 10 tahun 2016.SK kelompok Mahapi desa Salukai no 98/DS-SLK/IV/2016 dan dokumentasi kegiatan pembentukan kelompok. (sd 3 ind 3)

1. Ada diskusi reguler bulanan di tingkat kelompok membahas issue-issue terkait pelestarian danau poso di masing-masing desa target pertemuan kelompok membahas, AD/ART kelompok, structure kepengurusan, penyusunan program kerja, implementasi program kerja, survey monitoring kesehatan hutan, pilot project rehabilitasi lahan sejak dari pebibitan sampai penanaman dan pemeliharanya *dibuktikan oleh alat verifikasi AD/ART kelompok, Structure kepengurusan kelompok, program kerja kelompok, Laporan kegiatan pertemuan kelompok*
2. Ada sekretariat kelompok masyarakat pelestari kawasan DAS dan DTA danau poso di desa Meko dan Salukaia sekretariat masing masing kelompok disepakati di masing masing kantor desa *dibuktikan oleh alat verifikasi Adanya sekretariat kelompok di desa meko dan salukai*

B. Output

Output 1 telah dicapai oleh program ini, yakni “Membangun tata kelola untuk sepadan DAS Meko dan Salukaia di DTA Danau Poso pada level desa yang diintegrsikan dalam RPJMDes di desa Meko dan Salukaia serta renstra danau Poso,Rencana Kerja atau BP-DAS,KPH dan SKPD terkait”. Indikator output 1 yang pertama adalah “Adanya Dokumen Rencana Pengelolaan Sepadan DAS Meko dan Salukaia di DTA Danau Poso di level desa yang diintegrsikan dalam RPJMDes serta renstra danau Poso,Rencana Kerja atau BP-DAS,KPH dan SKPD terkait”indikator output ini dipenuhi dengan melaksanakan beberapa aktivitas yakni :

1. Sosialisasi formal dan informal untuk Adanya transparansi kesepemahaman, kesepakatan dan dukungan masyarakat di tingkat desa dan kabupaten terhadap rencana penyusunan Dokumen Pengelolaan Sepadan DAS Meko dan Salukaia di DTA Danau Poso *dibuktikan oleh alat verifikasi dokumentasi kegiatan, laporan kegiatan sosialisasi dan buku visum kunjungan ke SKPD terkait*
2. Pelatihan pengumpulan Informasi pemanfaatan SDA pada DAS Meko dan Salukai secara Partisipatif , dengan menggunakan metode PKP (*Perencanaan Konservasi Partisipatif*) Yang di fokuskan pada bagaimana peserta pelatihan mampu mengidentifikasi ancaman, sumber tekanan, peran stakeholder dan melakukan perencanaan atas wilayah DAS mereka. Kegiatan ini dilaksanakan di ibu kota kecamatan Pamona Barat tepatnya di balai desa meko, pada tanggal 21 – 23 Maret 2016 yang diikuti oleh 20 orang peserta dari desa Meko dan Salukai dengan komposisi 7 perempuan dan 13 Laki-lakidengan narasumber/trainer Bapak Suyanto dari TNC Indonesia, pada pelatihan ini peserta mendapatkan pengetahuan bagaimana caramenggali informasi dan membangun perencanaan pengelolaan kawasan konservasi secara partisipatif,serta mampu mengidentifikasi prioritas-prioritas konservasi di suatu wilayah mereka, dengan berfokus pada prioritas,mampu merancang strategi konservasi yang efisien dan efektif dengan melakukan analisis konteks interaksi dan rencana-rencana masyarakat dalam upaya perlindungan dan mengurangi tingkat ancaman terhadap sumber daya alam, dan merumuskan indikator-indikator keberhasilan untuk mengukur dampak strategi pengelolaan. Dalam proses pelatihan ini pesertamelakukan analisa masalah-masalah konservasi dari pandangan mereka secara umum, dengan memproyeksikan tentang hal-hal yang mereka paling hargai,memerlukan dari sebuah kawasan (System). Kegiatan yang di selenggarakan selama 3 hari peserta pelatihan juga di minta untuk memikirkan dan melihat kecenderungan perubahan yang terjadi pada sistem-sistem tersebut dan tingkat tekanan (Stresses) dan sumber tekanan (Sources) yang menyebabkan terjadinya perubahan pada rona lingkungan dan sumber daya alam mereka. Pemahaman akan kondisi wilayah dan para pemangku kepentingan yang memanfaatkan sumber daya alam di wilayah mereka menjadi hal yang sangat penting dalam melakukan analisis para pihak (Stakeholder), untuk merancang strategi- strategi yang lebih baik untuk mencapai sukses dalam pengeloaan sumber daya alam yang lebih baik di wilayah mereka,dari hasil pelatihan ini akan di aplikasikan dalam bentuk kunjungan lapangan yang di maksudkan untuk melihat langsung kondisi DAS di wilayah mereka dan juga pengumpulan informasi tentang pemanfaatan SDA oleh masyarakat dan dibuktikan dengan alat verifikasi Laporan kegiatan, dokumentasi kegiatan dan notulensi kegiatan.

3. Pengumpulan informasi SDA pada DAS Meko dan Salukai di DTA danau Poso dilakukan secara bersamaan di desa Meko dan Salukai pada tanggal 12 – 13 April 2016 oleh 20 orang masyarakat yang terdiri dari 3 perempuan dan 17 Laki-laki dengan melakukan wawancara dan kunjungan langsung ke lokasi –lokasi yang di anggap kritis pada wilayah pesisir pantai danau poso, muara sungai , sepadan sungai, kebun masyarakat yang berdekatan dengan sungai serta ke wilayah hutan lindung, kegiatan ini di maksudkan untuk menggali informasi tentang pola pemanfaatan dan model pengelolaan oleh masyarakat terkait sumber daya alam pada DAS Meko dan Salukia,serta informasi tentang tingkat ancaman dan tingkat kerusakan pada wilayah sepadan DAS Meko dan Salukia, Kegiatan ini menghasilkan data dan informasi potensi dan interaksi masyarakat terhadap kawasan hutan di sekitar sepadan DAS Meko dan Salukia serta DTA di Kawasan Danau Poso dengan menggunakan metode PKP (Perencanaan Konservasi Partisipatif) yang di jadikan salah satu basis data dalam penyusunan dokumen rencana partisipatif pengelolaan DAS Meko dan Salukia oleh masyarakat dalam rangka membangun tata kelola pada sepadan DAS Meko dan Salukia agar menjadi lebih baik dibuktikan dengan alat verifikasi template kegiatan, dokumentasi kegiatan dan data SDA hasil kompilasi dengan Pelatihan Perencanaan Konservasi Partisipatif (PKP).
4. Pertemuan lokakarya penyusunan draft dokumen rencana pengelolaan partisipatif pengelolaan DAS dan DTA danau poso untuk desa Meko dilaksanakan selama dua hari yaitu pada hari Rabu sampai kamis tanggal 27-28 Juli 2016 secara bersamaan di desa Meko dan desa Salukia dengan peserta sejumlah 50 orang dengan komposisi perempuan 17 orang dan laki-laki 33 orang. Pertemuan ini dihadiri oleh pemerintah desa, Perwakilan BPD dan tokoh masyarakat dan tokoh perempuan serta tokoh Agama. Kegiatan ini menindak lanjuti hasil dari pengumpulan informasi SDA pada wilayah sepadan DAS Meko dan Salukia, hasil dari informasi tersebut di jadikan basis data dalam menyusun dokumen rencana partisipatif pengelolaan DAS Meko dan Salukia di DTA danau Poso sehingga masyarakat dalam membuat kesepakatan menyadari benar hal-hal penting yang harus di lindungi dan menyepakati model pengelolaan dan pemanfaatan pada wilayah DAS Meko dan Salukia dan selanjutnya dokumen ini akan diintegrasikan kedalam renstra pengelolaan danau Poso, atau kedalam rencana kerja BP-DAS LH, KPH dan UPT lainnya. Pertemuan ini membahas pokok-pokok rencana dan klausul-klausul yang akan di masukan dalam draft dokumen kesepakatan partisipatif pengelolaan kawasan DAS Meko dan Salukia .
5. Konsultasi Publik draft dokumen ditingkat desa dilaksanakan masing-masing desa, desa Meko pada hari senin tanggal 21 November 2016 bertempat di kantor desa Meko yang dihadiri oleh 30 orang dengan komposisi Laki-laki= 19 dan perempuan=11 orang, desa Salukai dilaksanakan selasa tanggal 22 November 2016 bertempat di kantor desa Salukai dihadiri oleh 30 orang dengan komposisi laki-laki 22 orang dan perempuan 8 orang terdiri dari perwakilan SKPD terkait dan perwakilan Kecamatan, Babinkamtibmas Pamona Barat, Kepala desa Salukia, perwakilan pemerintah desa Toinasa dan desa Uranosari , Staff Bappeda dan Dinas Kehutanan, Perkumpulan Inovasi Komunitas serta kelompok Bungu Lestari dan anggota kelompok Mahapi.
6. Finalisasi, legalisasi dan sosialisasi document kesepakatan partisipatif pengelolaan kawasan DAS Meko dan Salukai di DTA danau Poso merupakan sebuah capaian sebagai tindak lanjut yang dijadikan pijakan dan arah oleh semua pihak dalam pemanfaatan dan pengelolaan kawasan DAS Meko dan Salukai di DTA danau Poso kearah yang lebih baik, sinergis dan berkelanjutan dan bisa di terima oleh semua pihak, legalisasi dokumen kesepakatan ditandatangani oleh pemerintah

desa, lembaga adat, Camat Pamona Barat dan Ketua Kelompok dari desa Meko dan Salukaia dan dibuktikan dengan template kegiatan, copy document dan dokumentasi kegiatan.

7. Pertemuan berkala multi Stakeholder dilaksanakan dalam rangka sosialisasi kesepakatan Partisipatif pengelolaan DAS Meko dan Salukai di DTA danau Poso dan di rangkaiakan konsultasi publik tingkat kecamatan, kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Camat Pamona Barat pada hari Kamis 24 November 2016 dihadiri oleh 47 orang dengan komposisi perempuan 11 orang dan laki-laki 36 orang. Peserta berasal dari SKPD terkait, pemerintah kecamatan Pamona Barat, TNI, Polri, Tokoh masyarakat, Perwakilan Perempuan, Pemerintah Desa se- kecamatan Pamona Barat dan masyarakat desa Meko dan Desa Salukaia dan dibuktikan dengan template kegiatan, copy document, notulensi kegiatan dan dokumentasi kegiatan.

Menindak lanjuti kegiatan berkala di level kecamatan, pertemuan berkala multi stakeholder kedua di laksanakan pada tanggal 29 November 2016 di Kantor Bappeda Poso dihadiri oleh 30 orang peserta dengan komposisi orang laki-laki 22 orang dan perempuan 8 orang. Peserta berasal dari SKPD terkait, pemerintah kecamatan Pamona Barat, Akademisi, NGO, Swasta, pemerintah desa Meko, pemerintah desa Salukai dan perwakilan kelompok Mahapi desa Salukai dan perwakilan Kelompok Bungu Lestari desa Meko. Pertemuan multi stake holder yang dikemas dalam bentuk konsultasi publik sekaligus sosialisasi lembaga Funding dan implementator, output program, kelompok pengelola DAS desa Meko (Bungu Lestari) dan Salukai (MAHAPI), dukungan dan komitmen dari SKPD terkait, Akademisi, dan pihak swasta merupakan capaian sekaligus indikator dari model kolaborasi multi pihak dalam pengelolaan kawasan DAS Meko dan Salukai di DTA danau Poso kearah yang lebih baik, sinergis dan berkelanjutan . Pencapaian indikator ini khususnya pada tingkat desa menjadisebuah hal yang strategis untuk di jadikan instrumen kebijakan desa yang di masukan atau di integrasikan dalam RPJMDesa, Rencana Kerja Tahunan Desa (RKPDes), dan pada saat Musrembangdesa serta di lingkaran dengan SKPD terkait serta pihak Swasta agar kesepakatan pengelolaan DAS Meko dan Salukia di DTA danau Poso ditingkat Desa bisa terintegrasi dan terealisasi dan dibuktikan dengan template kegiatan, copy document, notulensi kegiatan dan dokumentasi kegiatan.

Output 2 telah dicapai oleh program ini yakni :

Terbangunnya kapasitas Lokal untuk pelestarian danau poso di desa Meko dan Salukai agar dapat membangun sinergi dengan Pemda Poso, UPT terkait dan pihak lain indikator output 2 yang pertama adalah :ada 1 kelompok masyarakat pelestari kawasan DAS Meko dan Salukaia di DTA danau poso". Indikator output ini dipenuhi dengan melaksanakan beberapa aktivitas yakni :

1. Musyawarah desa pembentukan Kelompok Untuk membangun kesepahaman dan kesepakatan masyarakat desa Meko dan Salukaia di desa Meko dilaksanakan dimasing masing desa pada tanggal 20 dan 21 April 2016 di desa Meko dan Salukai yang dihadiri oleh 60 peserta dengan komposisi perempuan 16 orang dan laki-laki 44 orang serta unsur pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, lembaga adat, dan perwakilan masyarakat. Musyawarah desa ini bertujuan membangun kesepahaman dan kesepakatan masyarakat desa Meko dan Salukaia akan pentingnya membentuk kelompok pelestari kawasan DAS Meko dan

Salukaia di DTA danau poso sehingga terbentuk kelompok "BUNGU LESTARI" di desa Meko dengan jumlah anggota 15 orang dan kelompok "MAHAPI" di desa Salukai dengan dengan 15 orang anggota sekaligus membentuk struktur kepengurusan kelompok dan dibuktikan dengan alat verifikasi template kegiatan, SK kelompok Bungu Lestari desa Meko nomor 10 tahun 2016. SK kelompok Mahapi desa Salukai no 98/DS-SLK/IV/2016 dan dokumentasi kegiatan pembentukan kelompok.

2. Pertemuan penyusunan AD/ART kelompok dilaksanakan secara bersamaan di desa Meko dan Salukai pada hari Selasa sampai Kamis tanggal 27 - 30 Mei 2016 dihadiri 28 orang peserta dengan komposisi perempuan 9 orang dan laki-laki 19 orang. Pertemuan ini menghasilkan AD/ART kelompok sebagai landasan operasional agar dalam menjalankan roda organisasi mempunyai arah dan tujuan yang jelas dan memiliki mekanisme yang di sepakati selain itu di sepakati juga struktur dan pengurus kelompok serta Rencana Kerja yang di sesuaikan dengan kondisi sumber daya, potensi dan dinamika di masing-masing desa dan dibuktikan dengan alat verifikasi template kegiatan, dokumentasi AD/ART kelompok Bungu Lestari desa Meko dan kelompok mahapi desa Salukai dan dokumentasi kegiatan.

Indikator yang kedua dari output 1 adalah "Ada diskusi reguler bulanan di tingkat kelompok membahas issue-issue terkait pelestarian danau poso di masing-masing desa target". Indikator ini dipenuhi dengan melaksanakan beberapa aktivitas yakni :

1. Pelatihan Monitoring kesehatan hutan dilaksanakan Hari Jumat sampai minggu tanggal 24 - 26 Juni 2016 bertempat di kantor desa Salukaia merupakan gabungan kelompok dari desa Meko dan desa Salukaia dengan peserta sejumlah 32 orang dengan komposisi Laki-laki 23 orang dan Perempuan 9 orang. Tujuan dari pelatihan ini dilaksanakan agar kelompok yang dibentuk mampu melakukan monitoring dan kondisi hutan yang ada di wilayah mereka di antaranya untuk mengetahui tingkat kerapatan vegetasi, luas bukaan lahan dan tingkat interaksi masyarakat dengan hutan, dan dampak yang ditimbulkan akibat rusaknya kawasan hutan mereka dan dibuktikan dengan alat verifikasi template kegiatan, laporan kegiatan, dokumentasi kegiatan dan notulensi kegiatan.
2. Monitoring Kesehatan Hutan adalah tindak lanjut dari pelatihan Monitoring kesehatan hutan kegiatan Monitoring Kesehatan Hutan dilaksanakan secara bersamaan di dua desa pada Hari Rabu dan Kamis tanggal 20 - 21 Juli 2016 diikuti oleh 20 orang peserta dengan komposisi perempuan 8 orang dan laki-laki 12 orang yang didampingi langsung tim IMUNITAS, monitoring ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kerapatan vegetasi, luas bukaan lahan dan tingkat interaksi masyarakat dengan hutan yang ada, dan kondisi kesehatan hutan di wilayah desa mereka dan dibuktikan dengan alat verifikasi template kegiatan, laporan hasil monitoring, dan dokumentasi kegiatan monitoring.
3. Rehabilitasi lahan kritis pada DAS Meko dan Salukaiya kolaborasi masyarakat dengan UPT dan SKPD dilaksanakan pada tanggal 20 dan 21 Januari di desa Meko dan Salukai dengan melibatkan 30 orang yang terdiri dari perempuan 7 orang dan laki-laki 23 orang yang dihadiri oleh perwakilan kecamatan Pamona Barat, pemerintah desa Meko dan Salukaia, BPD tokoh masyarakat tokoh pemuda dan kelompok Bungu Lestari dan kelompok Mahapi, dengan penanaman pohon sebanyak 4000 pohon kayu berkualitas dan kayu yang bermanfaat sebagai tanaman obat yang dilakukan di lahan kritis sepanjang sepadan sungai meko dan sungau salukai, muara sungai, sepanjang pantai danau Poso seluas 10 hektar merupakan pencapaian kebersamaan, kegotong royongan, kepedulian dan keswadayaan masyarakat terhadap kawasan DAS Meko dan

Salukai di DTA danau Poso serta terbangunnya kesadaran pentingnya menjaga dan melestarikan kawasan DAS, DTA dan danau sebagai habitat flora dan fauna yang bermanfaat, terhindar dari bencana, menjaga ketersediaan dan kestabilan air dan menghambat laju degradasi dan deforestasi dan pendangkalan danau Poso dan dibuktikan dengan alat verifikasi template kegiatan dan dokumentasi kegiatan pembibitan dan penanaman.

4. Perawatan dan pemeliharaan pilot project Rehabilitasi lahan kritis pada DAS Meko dan Salukaiya kolaborasi masyarakat dengan UPT dan SKPD kegiatan ini dilaksanakan tahap awal sejak perawatan bibit dan tahap kedua pasca penanaman yang dimotori oleh Kelompok Bungu Lestari desa meko dan Kelompok Mahapi desa Salukai, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan, sejumlah dan melibatkan BPD dan pemerintah desa serta UPT SKPD yang sempat hadir sejumlah 32 orang dengan komposisi laki-laki = 24 orang dan perempuan = 8 orang dan dibuktikan dengan alat verifikasi template kegiatan, surat kesepakatan kerjasamapenyediaan bibit dan pemeliharaanya dan dokumentasi kegiatan perawatan tanaman.
5. Evaluasi bersama pemerintah desa, BPD, masyarakat, kelompok Bungu Lestari dan kelompok Mahapi serta Perkumpulan IMUNITAS Palu dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2017 dibalai pertemuan desa meko dengan peserta sebanyak 30 orang dengan komposisi perempuan 8 rang dan laki-laki sebanyak 22 orang dihadiri oleh perwakilan kecamatan, pemerintah desa meko dan salukai, BPD, kelompok Bungu Lestari dan kelompok Mahapi sebagai evaluasi bersama pelaksanaan program, lembaga pelaksana dan lembaga donor dan eksplorasi usulan untuk keberlanjutan program ke yayasan burung Indonesia dan dibuktikan dengan alat verifikasi template kegiatan dan dokumentasi kegiatan evaluasi.

Indikator yang ketiga dari output 1 adalah “Indikator yang kedua dari output 1 adalah “Ada sekretariat kelompok masyarakat pelestari kawasan DAS dan DTA danau poso di desa Meko dan Salukaia”. Indikator ini dipenuhi dengan melaksanakan beberapa aktivitas yakni dengan adanya sekretariat kelompok :Bungu Lestari di desa Meko dan Sekretariat Kelompok “Mahapi” di desa Salukai

									50 sampai 250 jiwa	251 sampai 500 jiwa	501 sampai 1000 jiwa	Diatas 1000 jiwa

b. Jumlah penerima manfaat (sd 3 ind 3)

Jenis Manfaat	Jumlah Penerima Manfaat (Laki-Laki)	Jumlah Penerima Manfaat (Perempuan)
Meningkatnya akses untuk air bersih	1784 jiwa	2659 jiwa
Meningkatnya ketersediaan pangan		
Meningkatnya akses ke sumber energi (listrik)		
Meningkatnya akses layanan publik (mis. Kesehatan, pendidikan dll.)		
Meningkatnya daya tahan terhadap perubahan iklim (731 jiwa	581 jiwa
Kepemilikan lahan yang jelas		
Pengakuan atas kearifan lokal		
Keterwakilan dan kesempatan yang semakin besar untuk pengambilan keputusan di pemerintahan	64 jiwa	25 jiwa
Peningkatan akses atas jasa lingkungan (<i>pengairan, air kolam, pariwisata, hasil huta non kayu</i>)	963 jiwa	848 jiwa
Pelatihan (sebutkan jenis pelatihan yang didapat oleh penerima manfaat)		
Pelatihan Pengumpulan data dan onformasih pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan metode Perencanaan Konservasi Partisipatif (PKP)	17 jiwa	3 jiwa
Pelatihan Monitoring kesehatan Hutan	23 jiwa	9 jiwa
Lain-lain		

Terbentuk kelompok Pelestari Bumbu lestar di desa Meko	9 jiwa	4 jiwa
Terbentuk Kelompok Mahapi desa Salukai	12 jiwa	3 jiwa
Total Penerima Manfaat	2142 jiwa	2093 jiwa

5. Regulasi/kebijakan lokal (sd 3 ind 3)

Nama Regulasi/Kebijakan	Ruang Lingkup (nasional, lokal, desa)	Topik	Hasil yang Diharapkan
Kesepakatan partisipatif pengelolaan kawasan DAS	Desa	Pengelolaan kawasan DAS Meko dan Salukai di DTA danau poso	Adanya tata kelola DAS Meko dan Salukai di DTA Danau Poso pada wilayah KBA Danau Poso

6. Jaringan kerja/forum multipihak

Nama Jaringan/Kemitraan	Ruang Lingkup (nasional, lokal)	Tujuan Penetapan	Tahun Penetapan

7. Bentang alam produktif (sd 2 ind 4)

Nama Bentang Alam Produktif	Bentuk Peningkatan Pengelolaan Bentang Alam Produktif	Luas (bagian) Bentang Alam Produktif yang Mendapatkan Peningkatan	Dokumen Verifikasi

		Pengelolaan	
KBA Danau Poso	<p>Pengelolaan Partisipatif DAS dan DTA Meko/Salukai melalui aktifitas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan kesepakatan partisipatif pengelolaan DAS Meko dan Salukai di DTA danau Poso 2. Fasilitasi kelompok Bunggu Lestari desa Meko dan Mahapi desa Salukai dalam Monitoring kesehatan Hutan 3. Fasilitasi kelompok Bunggu Lestari desa Meko dan Mahapi desa Salukai dalam Rehabilitasi lahan kritis 	<p>DAS meko seluas 46.793,16 Ha DAS Salukai 7.108,53</p>	<p>Dokument Kesepakatan partisipatif pengelolaan DAS Meko dan Salukai di DTA danau Poso</p> <p>Laporan kegiatan, data dan informasi Monitoring kesehatan hutan tahun 20016 di desa Meko dan salukai, dokumentasi kegiatan</p> <p>Laporan kegiatan dan dokumentasi</p>

V. PEMBELAJARAN

Isu	Keberhasilan/Kurang berhasil	Faktor Penyebab	Dampak	Rekomendasi
<p>Hasil :</p> <p>Pengelolaan DAS Secara Partisipatif</p> <p>Kolaborasi manajemen</p>	<p>Keberhasilan:</p> <p>a) Masyarakat memahami manfaat pentingnya SDA yang ada disekitarnya</p> <p>b) Masyarakat mampu mengidentifikasi SDA yang ada disekitarnya</p> <p>c) Masyarakat memiliki rasa tanggung jawab atas pengelolaan SDA yang ada disekitarnya</p> <p>Yang Kurang berhasil</p> <p>a) Pengakuan atas hak kelolah masyarakat terhadap SDA yang ada disekitarnya</p> <p>b) Kesadaran sebagian masyarakat atas akses SDA yang ada disekitarnya yang masih kurang.</p> <p>Keberhasilan :</p> <p>a) Pelibatan berbagai</p>	<p>Masyarakat telah mengetahui sistem, tekanan, sumber tekanan serta stake holder dan ukuran sukses dari rencana program</p> <p>Regulasi yang belum mampu mengakomodir aspek hak kelola masyarakat terhadap SDA</p> <p>Pemenuhan Kebutuhan masyarakat</p> <p>Persamaan visi</p>	<p>Berkurangnya pembukaan lahan, perambahan hutan, perburuan satwa liar, penangkapan ikan dengan strom dan racun</p> <p>Kurang kepercayaan diri masyarakat untuk mengelolah SDA yang ada disekitarnya</p> <p>Terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan</p> <p>Adanya dukungan dan</p>	<p>Pengakuan dan dukungan dari pemerintah desa kecamatan , kabupaten dan SKPD terkait</p> <p>Perlu Perdes Pengelolaan DAS diwilayah masing-masing</p> <p>Pengawasan dan control terhadap akses pemanfaatan SDA secara lestari.</p> <p>Perlu pendekatan</p>

	<p>pihak dalam pengelolaan DAS di DTA danau Poso</p> <p>b) Share program dan informasi</p> <p>Yang kurang berhasil</p> <p>a) Share program</p> <p>b) Sinergitas program</p>	<p>misi</p> <p>Kesamaan wilayah kelolah</p> <p>Mandat lembaga/ organisasi</p> <p>Perbedaan program dan skala prioritas</p> <p>Ego sektoral</p>	<p>pengakuan terhadap program dan kegiatan</p> <p>Tidak ada kerjasama program yang dapat dijalankan dalam waktu singkat</p> <p>Terjadi tumpang tindih organisasi di komunitas</p>	<p>yang lebih pro aktif dan penyesuaian implementasi program dengan perencanaan pembangunan di tingkat Pemda</p> <p>Perlu advokasi kesepakatan dan program kerja kedalam mekanisme resmi pemerintah</p>
<p>Proses :</p> <p>a. Pengelolaan DAS secara Partisipatif</p>	<p>Keberhasilan :</p> <p>a) Terbangunya kesadaran dan pemahaman pentingnya perlindungan terhadap DAS</p> <p>b) Adanya pegakuan dan terbukanya ruang kelolah masyarakat terhadap pengelolaan DAS</p> <p>Yang kurang berhasil</p> <p>a) Pemerintah belum mampu mengakomodir kebutuhan dan program keja</p>	<p>Menyadari manfaat DAS bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat</p> <p>Belum adanya Perda Pengelolaan DAS di Kabupaten</p>	<p>Meningkatnya Peran aktif masyarakat terhadap perlindungan dan pengawasan DAS di wilayahnya</p> <p>Kepercayaan diri dan ketegasan masyarakat terhadap</p>	<p>Dukungan stake holder terkait</p> <p>Perlunya regulasi yang mengakui dan yang menjamin pengelolaan DAS secara partisipatif oleh masyarakat</p>

<p>b. Kolaborasi pengelolaan DAS di DTA danau Poso</p>	<p>kolompok</p> <p>Keberhasilan :</p> <p>a) Terbangunya kesadaran dan pemahaman pentingnya keterlibatan berbagai pihak terhadap pengelolaan DAS dan DTA danau Poso</p> <p>b) Adanya share informasi program</p> <p>Yang kurang berhasil</p> <p>b) Belum ada Sharing dan kolaborasi program</p>	<p>Poso</p> <p>.</p> <p>Kesamaan visi misi dan program kerja</p> <p>Perbedaan kalender perencanaan, sumber daya dan durasi dan lokus program serta skal prioritas program</p>	<p>perlindungan dan penegakkan aturan pengelolaan DAS diwilayahnya, kelompok tidak berkembang dan bertahan lama</p> <p>Ada dukungan dan komitmen SKPD terkait terhadap perencanaan dan pengelolaan yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat</p> <p>Sulit mengsinergiskan dan kolanborasi program</p>	<p>Perlu membangun MoU dengan UPT, SKPD terkait, Akademisi, NGO dan awasta dalam Pengeloan DAS dan DTA danau Poso</p>
--	--	---	--	---

VI. STATUS KEUANGAN

- a. Pemasukan : Rp 253,770,000,-
- b. Pengeluaran : Rp 253,570,000,-
- c. Saldo : RP 333.000,-